

Vietnam: Rekonstruksi dan Pembangunan Sosialis

Asnani USMAN

Masalah pembangunan ekonomi Vietnam erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan persatuan negara ini sejak permulaan. Perjuangan melawan kembalinya penjajahan Perancis setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 menyebabkan Vietnam tidak sempat memikirkan rencana pembangunan ekonominya. Kebijakan ekonomi yang ditempuh bersifat spontan (tidak terencana) sesuai dengan kebutuhan, misalnya program penurunan sewa tanah yang dikeluarkan dalam dasawarsa 1940-an dan tahun 1953.

Tetapi setelah sebagian kemerdekaannya berhasil dipertahankan melalui Konferensi Jenewa 1954, Vietnam Utara mulai memikirkan usaha-usaha pembangunan ekonominya. Hal ini terwujud dengan ditetapkannya Rencana Tiga Tahun I (1955-1957) pada akhir tahun 1955. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas pembangunan ekonomi Vietnam sejak itu sampai sekarang.

REVOLUSI DAN PERENCANAAN EKONOMI "SOSIALIS" VIETNAM

Peperangan yang berlarut-larut selama 30 tahun dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan negara merupakan faktor utama yang menyebabkan Vietnam menghadapi berbagai kesulitan dalam pembangunan ekonomi dan negaranya yang dilandaskan pada ideologi komunis. Dalam salah satu thesis politik Partai Komunis Indocina dikemukakan "karakter dan tugas Revolusi Indocina" yang menjadi dasar strategi gerakan komunis untuk tahun-tahun mendatang yang terdiri atas dua tahap. *Tahap pertama* adalah revolusi demokrasi borjuis yang anti-imperialis dan anti-feodal. *Tahap kedua* adalah "revolusi rakyat atau sosialis" tanpa melewati pembangunan ekonomi kapitalis dengan sasaran pencapaian "pemilikan bersama alat-alat produksi,"

dan lenyapnya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.¹

Proklamasi kemerdekaan Vietnam Utara (Republik Demokrasi Vietnam/RDV) pada tanggal 2 September 1945 merupakan keberhasilan awal dalam revolusi tahap pertama yang "anti-imperialis" (Jepang). Tetapi perjuangan ini masih berlanjut dengan kembalinya penjajahan Perancis yang berakhir dengan terbaginya untuk sementara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebagai hasil Konferensi Jenewa 1954. Berbeda dari perjuangan melawan Jepang, dalam usaha Vietnam Utara mempertahankan kemerdekaan dari Perancis telah dilaksanakan kedua sasaran sekaligus perjuangan "anti-imperialis" dan "anti-feodal."

Tujuan utama Partai Pekerja Vietnam (yang didirikan setelah Partai Komunis Indocina dibubarkan tahun 1951) pada mulanya adalah melawan imperialis Perancis dan mencapai kemerdekaan. Tetapi karena dukungan dari kaum pekerja, borjuis, dan mahasiswa ternyata tidak mencapai kemajuan dalam perjuangan, Partai Pekerja Vietnam (PPV) telah mencari dukungan para petani di desa-desa. Selain itu keberhasilan Cina dalam perang saudara yang didukung oleh kaum tani tanpa perlawanan dalam kota juga merupakan salah satu faktor yang mendorong PPV untuk mengambil keputusan ini.

Untuk mencapai tujuan itu PPV menyusun suatu program menyeluruh untuk mempercepat revolusi anti-feodal melalui pembebasan tanah (*land reform*). Dalam bulan Januari 1953 diadakan suatu kampanye pembaruan pertanian yang dimulai dengan program penurunan sewa tanah dua tahun. Sebenarnya dalam dasawarsa 1940-an telah dilaksanakan penurunan sewa tanah dan bunga yang tinggi, tetapi tidak berhasil karena tidak dipatuhi oleh para pemilik tanah kaya yang dukungannya diharapkan dalam perjuangan Vietnam. Sebagai tindak lanjut dari kampanye itu pada akhir tahun 1953 diumumkan Kebijakan Pertanian Baru oleh Ho Chi Minh di Majelis Nasional.²

Dalam periode selanjutnya (1954-1960), Vietnam Utara lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi dalam usaha melaksanakan sasaran revolusi sosialis. Dalam jangka panjang pembangunan "ekonomi sosialis" adalah membangun "masyarakat komunis." Tetapi dalam jangka pendek, perhatian utama diberikan pada konsolidasi dukungan rakyat dan usaha menempatkan ekonomi pada suatu pijakan yang wajar. Kebijakan yang radikal dalam usaha menasionalisasi industri dan kolektivisasi pertanian hanya akan mengurangi dukungan rakyat bagi perjuangan persatuan Vietnam.³

¹Huynh Kim Khanh, *Vietnamese Communism 1925-1945* (Ithaca dan London: Cornell University Press, 1982), hal. 130; lihat juga, *idem*, "Year One of Postcolonial Vietnam," *Southeast Asian Affairs 1977* (Singapore: ISEAS, 1977), hal. 301.

²William J. Duiker, *The Communist Road to Power in Vietnam* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), hal. 152-154.

³*Idem*, *Vietnam: Nation in Revolution* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1983), hal. 102.

Oleh karena itu kebijakan ekonomi yang ditetapkan dalam masa-masa sesudah Konferensi Jenewa 1954 bersifat moderat. Walaupun bank-bank dan usaha-usaha bisnis berada di bawah pengawasan pemerintah, perdagangan barang pabrikan (*manufacturing*) tetap di tangan swasta dan kelas menengah ditenangkan dengan dijaminnya keuntungan mereka dan dimanfaatkannya keahlian mereka oleh rezim baru. Tetapi untuk memperluas pengawasan pemerintah atas kehidupan ekonomi dan mengadakan persiapan bagi pengembangan pemilikan sosialis telah ditempuh usaha-usaha pengaturan gaji, harga, dan alokasi barang-barang dan mendorong usaha swasta menjadi usaha patungan swasta dan pemerintah. Dalam patungan ini pihak swasta setuju menerima keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pemilikan. Imbalannya adalah subsidi negara dan kemudahan bagi akses bahan-bahan mentah.⁴

Kebijakan ekonomi yang moderat itu akan ditempuh PPV dalam perencanaan ekonomi sosialis yang dimulai pada akhir tahun 1955 setelah Badan Perencanaan Nasional dan Kantor Statistik Pusat dibentuk di Hanoi. Badan ini menetapkan Rencana Tiga Tahun I Restorasi Ekonomi dan Pembangunan Kebudayaan (1955-1957) yang pelaksanaannya dibantu oleh ahli-ahli dari Uni Soviet dan Cina. Tujuan utama perencanaan ini ialah meningkatkan hasil pertanian, memperbaiki usaha-usaha industri, memantapkan situasi keuangan dan ekonomi. Dari alokasi pengeluaran terlihat perencanaan ekonomi yang lebih dipusatkan pada pembangunan industri (38%) yang hampir dua kali lipat pembangunan pertanian (20%).⁵ Penekanan pada pembangunan industri yang dianut Uni Soviet dan Cina pada saat itu telah mempengaruhi perencanaan RDV. Hal ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh kedua negara itu kepada Vietnam.

Tetapi sasaran yang ingin dicapai⁶ oleh Rencana Tiga Tahun I itu telah mengalami berbagai hambatan. Kerusakan panen akibat bencana alam dan terpisahnya delta Sungai Mekong dengan surplus pertanian yang berada di Vietnam Selatan menyebabkan Vietnam Utara kekurangan pangan. Keberhasilan program *land reform* yang dilaksanakan sejak tahun 1954 dalam pembagian tanah (800.000 hektar tanah telah dibagikan dan 2 juta keluarga petani telah menerima tanah)⁷ tidak disertai peningkatan produksi. Program pembagian tanah yang dipaksakan tanpa insentif bagi para petani menyebabkan tidak tercapainya peningkatan itu.⁸ Selain itu, tindakan sewenang-wenang

⁴*Ibid.*

⁵John F. Cady, *The History of Post War Southeast Asia* (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1974), hal. 311; lihat juga Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar Economic Planning and Development of Vietnam," *Southeast Asian Affairs 1978* (Singapore: ISEAS, 1978), hal. 305.

⁶Lihat uraian mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Tiga Tahun I dalam *ibid.*

⁷Duiker, *Vietnam*, hal. 103.

⁸Cady, *The History*, hal. 311.

dalam penanganan program land reform telah menimbulkan pemberontakan petani yang pecah pada tahun 1956. Peristiwa ini menyebabkan tergesernya Truong Chin sebagai Sekjen PPV, walaupun kedudukannya sebagai anggota Politbiro masih tetap.

Karena kekurangan pangan akibat hasil panen jelek tahun 1957-1958, sasaran utama Rencana Tiga Tahun II untuk Transformasi Pembangunan Ekonomi dan Kebudayaan (1958-1960) yang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-14 Komite Sentral PPV dalam bulan November 1958 lebih ditujukan pada pertanian di samping industri. Untuk mencapai tujuan ini pimpinan partai telah memutuskan untuk memulai proses kolektivisasi pertanian tahun 1958 yang akan dilakukan secara bertahap⁹ dan berhati-hati serta dengan pemaksaan minim untuk mencegah terulangnya kerusuhan.

Pelaksanaan kedua rencana di atas dinilai berhasil dalam beberapa sektor. Sektor industri mengalami kemajuan, tetapi penyediaan pangan yang ingin dicapai dalam kolektivisasi pertanian tidak mencapai sasaran karena kegagalan panen. Dalam proses pelaksanaan ekonomi sosialis, sektor-sektor industri, perdagangan, dan pelayanan masyarakat telah menjadi usaha pemerintah. Demikian pula kolektivisasi pertanian mencapai 80% tanah yang bisa ditanami. Koperasi negara telah meliputi berbagai usaha jasa yang sebelumnya dikelola oleh usaha-usaha bisnis kecil.¹⁰

Keberhasilan produksi industri itu tampaknya tidak saja didukung oleh kondisi wilayah Vietnam Utara yang kaya hasil tambang, tetapi juga karena bantuan Soviet. Uni Soviet dan RDV telah menandatangani persetujuan kedua negara mengenai bantuan pengetahuan dan teknik dalam bulan Maret 1959. Dana pinjaman Soviet untuk periode tiga tahun berikutnya melebihi bantuan Cina.¹¹ Oleh karena itu tidak mengherankan jika arah pembangunan ekonomi RDV dalam dasawarsa 1960-an makin menuju kebijakan pembangunan industri berat seperti yang dianut Uni Soviet.

Hal tersebut terlihat dalam Rencana Lima Tahun I (1961-1965) yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-3 PPV yang menyebutkan sasaran yang

⁹Kolektivisasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu: *tahap pertama* adalah penetapan tim kerja musiman di mana keluarga petani bisa mengadakan pembagian kerja selama musim panen, memperoleh pemilikan tanah dan alat-alat serta tetap memperoleh keuntungan; *tahap kedua* adalah koperasi bentuk semi-sosial kelompok kecil desa di mana para petani menggabungkan alat-alat dan tanah mereka dan menerima hasil panen yang sesuai dengan pekerjaan dan tanah mereka dalam suatu organisasi; *tahap ketiga* adalah kolektif pertanian secara penuh. Ini lebih besar daripada koperasi, dan para petani yang bergabung melepaskan hak mereka atas seluruh tanah, alat-alat dan ternak pertanian untuk mendukung organisasi. Pembayaran dibuat atas jumlah tanah yang diberikan oleh keluarga pribadi (Duiker, *Vietnam*, hal. 104).

¹⁰Cady, "The History," hal. 313; lihat juga Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar," hal. 306.

¹¹*Ibid.*, hal. 312.

ingin dicapai, yaitu meletakkan pokok-pokok sosialis dan dasar-dasar teknis untuk mengembangkan industrialisasi, memberikan prioritas kepada industri berat, dan menyempurnakan pembentukan sosialis. Perkembangan yang semakin menitikberatkan industri berat ini sesuai dengan keinginan Sekjen PPV, Le Duan (yang menjabat Sekjen tahun 1960), yang memberikan perhatian lebih besar kepada revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor-faktor penting untuk melakukan konsolidasi pembangunan sosialis.

Dalam pelaksanaannya, walaupun target dalam Rencana Lima Tahun I tidak pernah tercapai karena terlalu ambisius (sasaran produksi industri 89% dan pertanian 79%),¹² penyempurnaan pembentukan ekonomi sosialis mendapat kemajuan. Pada akhir tahun 1965, sektor pelayanan masyarakat memperoleh peranan penting dalam ekonomi nasional. Dan lebih dari 90% sektor industri telah dinasionalisasikan dan pertanian telah menjadi pemilikan kolektif. Hanya beberapa area, seperti perdagangan domestik, masih menjadi milik swasta (dimiliki oleh kelompok Cina perantauan). Tetapi RDV masih mengalami kekurangan pangan karena rendahnya produksi pertanian di satu pihak dan makin bertambahnya penduduk (2,2% per tahun) di lain pihak. Kurangnya mekanisasi (hanya 7% tanah yang diolah traktor) merupakan salah satu sebab rendahnya produksi pertanian.¹³

Berbeda dengan situasi sebelumnya, dalam periode di atas Ho Chi Minh telah dihadapkan kepada dua pilihan yaitu mengadakan pembangunan ekonomi atau menyelesaikan cita-cita revolusi untuk persatuan Vietnam. Situasi Vietnam Selatan yang makin kacau oleh pergolakan-pergolakan dalam negeri merupakan peluang dan pendorong bagi PPV untuk menyempurnakan perjuangan anti-imperialis. Oleh karena itu Ho Chi Minh memutuskan kedua hal tersebut dilaksanakan sekaligus. Pada tahun 1960 Ho Chi Minh mendukung perjuangan Front Pembebasan Nasional (*NLF*) untuk mengusir Amerika Serikat yang membantu rezim Saigon sebagai sasaran perjuangan anti-imperialis yang belum selesai.

Ternyata keputusan itu telah menghambat dan menghancurkan pembangunan ekonomi sosialis RDV yang sedang berjalan karena pemboman atas Hanoi oleh Amerika Serikat sejak Februari 1965-April 1968. Rencana Lima Tahun yang akan ditetapkan pada tahun 1966 dikesampingkan, dan hanya ditetapkan per tahun. Keadaan darurat telah memaksa pimpinan PPV mengadakan desentralisasi pengawasan atas setiap aspek ekonomi, sehingga menimbulkan berbagai "penyimpangan" dari "cetakan biru resmi" (*blue print*) selama ini. Perencanaan industri dialihkan ke desa-desa dan kader-kader dipekerjakan. Dalam bidang pertanian, dilaksanakan apa yang disebut Tiga Sistem Kontrak dengan berbagai tahap koperasi sub-kontrak dan tanah

¹²Ta Huu Phuong dan Guy Ta, *The Postwar*, hal. 30.

¹³Duiker, *Vietnam*, hal. 104.

pribadi. Masa ini merupakan suatu periode melemahnya pengawasan pusat atas kehidupan ekonomi dan disiplin sosialis. Tetapi langkah ini dianggap sebagai suatu taktik yang layak ditempuh dan diijinkan oleh PPV untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak waktu perang.¹⁴

Perkembangan di atas telah menimbulkan berbagai tanggapan dalam pimpinan partai. Truong Chin menggambarkan kebijakan tersebut sebagai "suatu bahaya kemunduran prinsip-prinsip sosialis." Secara khusus Truong Chin telah mengecam kompromi yang menyangkut produksi dan menolak gagasan bahwa produksi dapat dilakukan dengan cara apa pun untuk mencapai peningkatan produksi sosial.¹⁵ Bahkan Le Duan yang dikenal lebih moderat menyatakan bahwa munculnya otonomi dalam koperasi selama masa pemboman telah memisahkan setiap kolektif kecil dari kesatuan pimpinan negara proletar. Berbeda dengan Truong Chin, Le Duan tidak terlalu menentang pendekatan manajemen ekonomi yang kurang ortodoks yang harus dimanfaatkan secara tepat, seperti penggunaan harga, gaji, keuntungan, kredit, dan perhitungan biaya.¹⁶

Walaupun terdapat perbedaan sikap mengenai kebijakan ekonomi sosialis antara Truong Chin dan Le Duan, kedua pimpinan ini tetap sepakat tentang tujuan utama revolusi Vietnam, yaitu pembangunan sosialis. Oleh karena itu dalam Sidang Pleno ke-19 Komite Sentral PPV dalam bulan Januari 1971, Le Duan menekankan perlunya resentralisasi manajemen ekonomi dan pengawasan ketat atas koperasi pertanian.¹⁷ Tampaknya meredanya situasi konflik pada saat itu dan dimulainya usaha-usaha perundingan antara RDV dan Amerika Serikat telah mendorong perubahan kebijakan tersebut. Tetapi usaha-usaha yang ditempuh pada awal dasawarsa 1970-an untuk melenyapkan "kembali cara-cara pelaksanaan individualis" telah mendapat hambatan dengan adanya pemboman kembali oleh Amerika Serikat tahun 1972-1973 yang diakhiri dengan Persetujuan Paris 1973.

PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Dicapainya Persetujuan Paris memberikan kesempatan kepada RDV untuk mengadakan pembangunan kembali perekonomiannya yang mengalami

¹⁴Tan Teng Lang, *Economic Debates in Vietnam, Issues and Problems in Reconstruction and Development (1975-1984)*, Research Notes and Discussions Paper No. 55 (Singapore: ISEAS, 1985), hal. 7.

¹⁵*Ibid.*, dikutip dari Truong Chin, "Weakness, Shortcomings and Mistakes in Agriculture Cooperatives," *Vietnam: Documents and Research Notes*, Document No. 63 (Saigon: US Mission in Vietnam, Januari 1969), hal. 9.

¹⁶*Ibid.*, hal. 8, dikutip dari Le Duan, "The Vietnamese Revolution Fundamental Problems, Essential Tasks," *Selected Writings* (Hanoi: Foreign Language Publishing House, 1977), hal. 232.

¹⁷*Ibid.*

kehancuran karena pemboman. Dalam waktu dua tahun perekonomian RDV mengalami berbagai kemajuan baik industri maupun pertanian.¹⁸ Bantuan dari negara-negara komunis Uni Soviet yang berjumlah US\$767 juta, dan Cina serta Eropa Timur yang berjumlah US\$1,32 milyar dalam tahun 1974-1975 mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di atas.¹⁹ Tetapi jatuhnya Saigon tahun 1975 menyebabkan PPV harus mengadakan penilaian dan pengaturan kembali perencanaan pembangunan ekonomi sosialis yang mencakup Vietnam Selatan.

Perbedaan ideologi, sistem ekonomi dan kondisi wilayah yang dimiliki oleh kedua bagian Vietnam telah menimbulkan berbagai persoalan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan sistem sosialis. Di satu pihak Vietnam Utara harus memperbarui dan memantapkan pembangunan sosialis, dan di lain pihak Vietnam Selatan harus melaksanakan transformasi sistem kapitalis ke sistem sosialis. Tugas ini makin dipersulit oleh situasi dan kondisi kedua bagian negara itu akibat perang.

Sehubungan dengan masalah penyatuan Vietnam Utara dan Selatan telah timbul perdebatan dalam pimpinan PPV mengenai pelaksanaannya, yaitu apakah akan dilakukan secara bertahap atau secara cepat. Le Duan dalam pidato kemenangannya di Komite Sentral PPV bulan Mei 1975 menekankan bahwa di Vietnam Selatan akan diterapkan suatu rezim demokrasi nasional yang baik, suatu ekonomi demokrasi dan nasional yang sejahtera, sedangkan di Vietnam Utara harus dilaksanakan pembangunan sosialis. Demikian pula PM Pham Van Dong menyatakan bahwa rezim baru akan mendorong pelaksanaan secara normal seluruh perusahaan dan pabrik dari semua ukuran untuk mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Bahkan Truong Chin yang dikenal ortodoks memberikan dukungannya pada penyatuan bertahap dan menegaskan perlunya menyingkirkan perbedaan dan menyatukan persamaan secara bertahap dalam usaha pembangunan sosialis.²⁰ Demikianlah kemudian diputuskan untuk melaksanakan penyatuan bertahap. Hal ini berarti penerapan sistem campuran yang berangsur-angsur mengarah penyatuan.

Prioritas utama dalam usaha penyatuan Vietnam adalah pemenuhan

¹⁸Lihat uraian lebih lanjut mengenai kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh RDV dalam pembangunan ekonominya tahun 1973-1975 dalam Hyunh Kim Khanh, "Year One," hal. 290-291.

¹⁹Lihat Paul Quin-Judge, "A Test of Patience," *FEER* (24 Mei 1984): hal. 80.

²⁰Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 12, pernyataan Le Duan dikutip dari Le Duan, "Forward to the Future," *Vietnam Courier*, No. 37 (Juni 1975): hal. 7; pernyataan Pham Van Dong dikutip dari Pham Van Dong, "The Nation's New Tasks," *Vietnam Courier*, No. 41 (Oktober 1975): hal. 3; pernyataan Truong Chin dikutip dari Truong Chin, "Toward Completion of National Reunification: The Substance, Objectives and Urgent Problems to be Solved" -- A Political Report to the Political Consultative Conference on National Reunification, at the first session held on 14 November 1975, *Vietnam Courier*, No. 43 (Desember 1975): hal. 4.

kebutuhan pangan dengan memperluas lahan pertanian dan memperluas lapangan kerja bagi 3,5 juta penganggur. Untuk ini direncanakan dua program, yaitu mengembalikan para petani yang mengungsi ke kota selama perang ke daerah asalnya; dan membentuk Zona Ekonomi Baru (ZEB) untuk penempatan para penganggur menjadi petani di desa-desa. Dengan penetapan kebijakan ini terlihat adanya penegasan kembali bidang pertanian dan pergeseran dari penekanan pembangunan industri berat yang ditempuh sejak 1960. Tetapi pelaksanaan ZEB ini tidak mudah dilaksanakan karena faktor-faktor psikologis (keengganan penduduk untuk berpisah dengan familinya dan lingkungan adat), dan investasi dalam infrastruktur (transpor, perumahan).²¹

Dalam bulan-bulan berikutnya setelah percobaan pelaksanaan pembangunan sosialis secara bertahap, PPV menyadari bahwa perbedaan atau pemisahan cara pelaksanaan bagi dua wilayah akan menciptakan kesulitan yang lebih jauh bagi penyatuan kembali. Situasi ini telah menimbulkan perubahan sikap terhadap penyatuan secara bertahap. Truong Chin antara lain mengatakan bahwa diperlambatnya reunifikasi akan menimbulkan kesulitan perencanaan, pembangunan ekonomi nasional dan penyatuan pertahanan nasional. Kekhawatiran dan pertimbangan ini telah mengubah sikap semula dan diputuskan bahwa reunifikasi harus dipercepat. Keputusan ini makin diperkuat dengan ditolaknya Pemerintahan Revolusioner Sementara (*Provisional Revolutionary Government/PRG*) menjadi anggota PBB karena veto Amerika Serikat. Dan timbulnya masalah perbatasan dengan Kam-puchea, kekhawatiran tentang hubungan Cina-Vietnam juga telah mendorong keputusan itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, dalam bulan Juli 1976 diadakan penyatuan kembali dengan dibentuknya Republik Sosialis Vietnam (RSV). PPV diganti menjadi Partai Komunis Vietnam (PKV).

Kemudian dibentuk pimpinan RSV yang merupakan gabungan dari kedua Pemerintah RDV dan PRG, Ton Duc Thang (sebelumnya Presiden DRV) dipilih menjadi Presiden RSV, Nguyen Luong Bang (sebelumnya Wakil Presiden DRV) dipilih menjadi Wakil Presiden. Nguyen Hun Tho (sebelumnya Presiden Dewan Penasihat PRG) juga dipilih menjadi Wakil Presiden, Truong Chin (sebelumnya Ketua Komite Tetap Majelis Nasional RDV) dipilih menjadi Ketua Komite Tetap Majelis Nasional RSV, dan Pham Van Dong (sebelumnya Perdana Menteri RDV) dipilih menjadi Perdana Menteri RSV. Anggota-anggota Kabinet, termasuk tujuh Deputi Perdana Menteri yang dipilih PM Pham Van Dong, adalah Pham Hung (Selatan), Huynh Tan Phat (Selatan), Vo Nguyen Giap (Tengah), Nguyen Duy Trinh, Le Thanh Nghi (Utara), Vo Chi Cong (Selatan), Do Muoi (Utara).²²

²¹Ta Huu Phuong dan Guy Ta, "The Postwar," hal. 309; lihat juga Duiker, *Vietnam*, hal. 107.

²²Huynh Kim Khanh, "Year One," hal. 305.

Gabungan pimpinan Utara dan Selatan tersebut di masa-masa mendatang akan mempengaruhi timbulnya perdebatan mengenai penerapan kebijakan ekonomi nasional RSV, apalagi mengingat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kedua wilayah ini. Dari gabungan ini tampaknya tidak sulit diduga bahwa pimpinan dari Utara akan lebih menganut kebijakan yang lebih kaku atau bergaris keras dan akan mempunyai kekhawatiran lebih besar akan terancamnya tujuan pembangunan sosialis dengan adanya penyatuan Selatan yang sebelumnya menganut sistem kapitalis. Sebaliknya pimpinan di Selatan menginginkan kebijakan moderat dan bertahap yang dianggap lebih tepat mengingat sistem kapitalis yang dianut sebelumnya. Kemungkinan penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari penetapan pusat (Hanoi) bisa terjadi, terutama apabila pengawasan berada di tingkat lokal.

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi RSV telah ditetapkan Rencana Lima Tahun II (1976-1980) oleh Kongres Partai ke-4 bulan Desember 1976. Dari petunjuk-petunjuk yang digariskan dan pernyataan para pimpinan, tampak pelaksanaan akan diterapkan lebih luwes dan bertahap, walaupun sasaran yang ingin dicapai tetap yaitu pada waktu yang sama dilaksanakan penyempurnaan sosialis di Utara dan percepatan transformasi sosialis di Selatan.

Sikap tersebut terlihat pada pernyataan Menteri Pertanian Vo Thuc Dong yang menegaskan bahwa "... harus ada kebijakan-kebijakan untuk mendorong petani menghasilkan dan memperoleh keuntungan dari produksi." Ditegaskannya juga bahwa mengingat "cara-cara produksi yang individualis di Selatan, pertanian dapat dipercepat dengan penggabungan pendidikan politik dan insentif material." Kemudian dalam laporan politik dikemukakan bahwa "usaha-usaha kecil yang dapat lebih mudah diawasi lebih dekat, akan diijinkan untuk melanjutkan kegiatannya." Selain itu kegiatan sektor swasta masih diakui untuk memberi keuntungan ekonomi nasional dan kehidupan rakyat. Tetapi usaha-usaha industri berat dan komersial akan segera dinasionalisasikan.²³

Di samping itu, sikap di atas terlihat dari pertimbangan para pimpinan Vietnam dalam pelaksanaan Rencana Lima Tahun II yang meliputi berbagai faktor, yaitu: (1) peningkatan produksi pertanian untuk kebutuhan sendiri dan ekspor melalui pengaturan kembali program desa besar-besaran dan transformasi sosial secara bertahap; (2) pemanfaatan kemampuan produksi sektor swasta untuk penyediaan barang-barang konsumsi dan devisa; (3) sumber-sumber luar negeri untuk pembiayaan perencanaan, yaitu bantuan asing baik dari negara-negara komunis maupun negara-negara Barat, dan

²³Lihat pernyataan Vo Thuc Dong dalam Nayan Chanda, "Hanoi Comes Down to Earth," *FEER* (4 Februari 1977): hal. 30; dan "The East-West Touch," *FEER* (17 Desember 1976): hal. 20.

lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam hal ini PKV mengharapkan bantuan Amerika Serikat sejumlah US\$3,2 milyar.²⁴

Tetapi setahun kemudian hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan di atas tidak menggembirakan. Hal ini dikemukakan dalam Laporan Dewan Pemerintah kepada Majelis Nasional dalam bulan Desember 1977 yang menilai keadaan pada saat itu sebagai "salah satu dari sekian banyak kesulitan dan pembangunan tidak seimbang." Dalam sektor swasta terlihat bahwa peluang yang diberikan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi dan devisa tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Adanya pemilik-pemilik modal telah mengganggu pengawasan pemerintah dan distribusi. Hal ini disebabkan oleh harga yang lebih tinggi yang ditawarkan kepada para petani. Produksi pertanian tidak menunjukkan hasil. Dan keputusan untuk mempercepat kooperativisasi yang ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral sebagai salah satu usaha untuk mengatasi hal ini belum mempunyai program yang terinci.

Perkembangan di atas telah menimbulkan perdebatan di kalangan pimpinan partai. Di satu pihak para pembela pembangunan sosialis bertahap menyatakan bahwa sumber ketidakberhasilan adalah kurangnya insentif dan diperlukan kebijakan yang lebih moderat. Di lain pihak para penentang kebijakan tersebut menganggap ketidakberhasilan disebabkan oleh kurangnya disiplin dan sebab itu diperlukan ikatan atau penerapan pengawasan yang lebih ketat.²⁵

Tampaknya tanggapan dari kelompok terakhir ini mendapat perhatian dengan ditempuhnya kebijakan yang lebih kaku (keras) yang dimulai pada awal 1978, walaupun sebenarnya telah diusahakan penerapannya sejak pertengahan tahun 1977 dengan dikeluarkannya keputusan mempercepat kooperativisasi di Selatan. Dan realisasi keputusan ini baru terlihat pada awal Januari 1978 dengan dijelaskannya program percepatan kooperativisasi secara terinci dalam konperensi yang diadakan di Ho Chi Minh City. Ditetapkan juga kerangka waktu untuk penyempurnaan program ini pada akhir tahun 1978.

Perubahan kebijakan itu meliputi juga perdagangan dan usaha-usaha swasta dengan dikeluarkannya perintah oleh pemerintah untuk melenyapkan semua kegiatan ini pada bulan Maret 1978. Hal ini merupakan tugas yang berat bagi Hanoi karena kegiatan-kegiatan ini meliputi 65% di Selatan.²⁶ Pedagang-pedagang kecil (eceran) tetap tidak berada di bawah pengawasan pemerintah. Walaupun demikian perubahan kebijakan itu tidak dapat

²⁴*Idem*, "A Last Minute Rescue," *FEER* (27 Februari 1971): hal. 31.

²⁵Tan Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 18.

²⁶Chanda, "Hanoi Takes Grip on the South," *FEER* (26 Mei 1978): hal. 78.

mengatasi keadaan ekonomi. Pada akhir tahun 1978 pertumbuhan rata-rata tiap tahun telah turun menjadi 7% dari 9% tahun 1976. Pengangguran meningkat 13% dari jumlah tenaga kerja 23 juta. Produksi pertanian turun dari 13 juta ton tahun 1976 menjadi 11 juta ton tahun 1978.²⁷

Ketidakberhasilan kebijakan di atas disebabkan oleh berbagai faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor intern itu di antaranya adalah pemerintah yang tidak efisien, terjadinya bencana alam (iklim), perbedaan karakter antara bangsa Vietnam Utara dan Selatan, sasaran yang ambisius dari perencanaan, kurangnya insentif dan biaya, kader-kader yang tidak terlatih dan trampil, kelembaman birokrasi, timbulnya korupsi dan masalah kepemimpinan. Faktor lain adalah kesalahan dan kelalaian serius yang dilakukan dalam penilaian situasi dan implementasi garis dan kebijakan Partai, termasuk perencanaan dan proses industri yang rumit dan masalah manajemen. Dilakukannya kesalahan dan kelalaian ini oleh para pimpinan Partai disebabkan kemenangan yang dicapai lebih awal daripada yang diperkirakan dalam mengalahkan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat. Mereka tidak lagi melihat kenyataan yang ada dan menganggap semua rencana mudah dan mungkin dicapai dengan cepat (sikap ini disebut "voluntarism").²⁸

Akibat-akibat sikap seperti itu terjadi perluasan investasi dalam proyek-proyek yang sangat besar dalam pembangunan industri berat, sementara rehabilitasi negara akibat perang sulit dicapai. Selain itu terjadi pembangunan energi dan transportasi yang hanya bersifat sementara. Para perencana dan manajer kurang mampu melaksanakan tugas mereka, karena masih sedang dalam tahap belajar. Di lain pihak penduduk masih mengalami kekurangan kebutuhan sehari-hari.

Kesalahan menilai perkembangan situasi internasional merupakan faktor ekstern yang menghambat pembangunan ekonominya. Dihentikannya bantuan Cina yang telah menyetujui bantuan US\$1,5 milyar²⁹ untuk Rencana Lima Tahun II telah melenyapkan harapan Vietnam untuk memperoleh sumber biaya pembangunannya. Kemudian pengusiran suku etnis Hoa telah menyebabkan tutupnya berbagai usaha swasta dan pembangunan di Utara. Sebagai reaksi terhadap sikap Cina, Vietnam telah menerima tawaran Soviet untuk menjadi anggota CMEA (*Council for Mutual Economic Assistance* atau *COMECON*) dalam bulan Juni 1978.

Invasi Vietnam ke Kamboja telah menyebabkan negara ini tidak dapat mengharapkan bantuan baik dari Amerika Serikat, negara-negara Barat,

²⁷*Idem*, "Vietnam's Battle of the Home Front," *FEER* (2 November 1979): hal. 45.

²⁸Ton That Thien, "Vietnam's New Economic Policy, Notes and Comments," *Pacific Affairs*, Vol. 56 No. 4 (Winter, 1984-84): hal. 693.

²⁹*Asian Security 1981* (Japan: Research Institute for Peace and Security, 1981), hal. 60.

maupun Jepang. Sikap ini mendukung sikap negara-negara ASEAN yang bertujuan mengisolasi Vietnam sampai negara ini menarik pasukannya dari Kamboja. Demikianlah akhirnya Vietnam kehilangan sumber-sumber yang pernah ditargetkan untuk membiayai pembangunan perekonomiannya yang merupakan salah satu faktor kegagalan perencanaan ekonominya.

KEBIJAKAN EKONOMI BARU (NEP)

Menghadapi situasi di atas, pada pertengahan 1979 para perencana Vietnam mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembangunan ekonomi yaitu pilihan antara memperkuat struktur kepemimpinan atau menerapkan penggunaan insentif untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri. Hal ini berarti pilihan antara pengetatan pengawasan atau liberalisasi ekonomi.

Perubahan dalam pendekatan pada pembangunan ekonomi ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral (Kongres Partai ke-4) dalam bulan Juli 1979. Berdasarkan resolusi sidang ini Dewan Menteri telah menyusun sejumlah kebijakan ekonomi baru, yaitu penghapusan seluruh pembatasan-pembatasan, pengembangan inisiatif dan kreativitas dalam seluruh sektor dan lokal, serta merangsang kegiatan produksi seluruh pekerjaan untuk mempercepat produksi. Selain itu kepentingan-kepentingan masyarakat, kelompok kolektif, dan para pekerja dipadukan secara tepat.³⁰

Tetapi hal yang penting dari dihasilkannya resolusi itu ialah tidak terlihat adanya penekanan (penegasan) atas NEP baik dalam pengumumannya maupun pelaksanaannya. Dalam pidato-pidato para pendukung kebijakan tersebut tidak tampak pernyataan-pernyataan yang mendorong rakyat untuk mendukung kebijakan tersebut. Hal ini bukan saja mencerminkan adanya keengganan untuk mendukung kebijakan ekonomi baru itu secara jelas sampai telah dibuktikan realisasinya, tetapi juga menunjukkan tidak adanya suatu konsensus di kalangan partai.³¹

Ketidajelasan dan keragu-raguan sikap itu tidak berlangsung lama yaitu sampai diadakannya Sidang Pleno ke-6 bulan September 1979 yang menetapkan perluasan program konkret kebijakan ekonomi baru yang akan menjadi dasar pembangunan ekonomi. Dalam sidang ini terlihat jelas adanya dua kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok pragmatis dan kelompok ideologis atau kelompok moderat dan kelompok bergaris keras.

³⁰Tan Teng Lang, *Economic Debates*, hal. 25-26, dikutip dari editorial *Nhan Dan*, 7 Agustus 1979.

³¹*Ibid.*

Kelompok pragmatis mendukung peranan usaha swasta (produksi modal skala kecil), penggunaan insentif material (kontrak hasil, tingkat kerja dan perbedaan gaji), pengurangan pengawasan pemerintah atas harga, sirkulasi dan distribusi barang-barang, dan pembaruan partai serta birokrasi negara. Sebaliknya kelompok ideologis mendukung pembangunan produksi skala besar, sentralisasi perencanaan negara dan pengawasan atas ekonomi, termasuk sirkulasi dan distribusi barang-barang di Selatan, kolektivisasi pertanian di Selatan dan memperkuat hubungan produksi sosialis.³² Adanya dua kelompok inilah yang telah menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi Vietnam yang akan diterapkan.

NEP yang ditetapkan pada Sidang Pleno ke-6 menegaskan kembali keputusan sebelumnya dengan program yang lebih konkret. Dalam NEP akan didorong inisiatif dan kreativitas swasta yang mencakup para petani, produsen, pedagang, perusahaan keluarga dalam produksi dan peredaran komoditi. Semuanya bebas dari pengawasan pemerintah. Dan untuk mendorong distribusi barang yang lebih efisien, PM Pham Van Dong telah memberikan perintah dalam bulan Agustus 1979 untuk menghapus pengawasan pangkalan (stasiun) karena pengawasan ini dianggap menghambat arus lalu-lintas barang dan kegiatan pasar.³³

Demikian pula birokrasi dan subsidi diperlonggar. Peraturan-peraturan yang menghambat kebebasan bergerak dan inisiatif dihapuskan. Prinsip-prinsip yang diterapkan adalah efisiensi dan pembiayaan sendiri dan kebebasan melaksanakan produksi dan distribusi. Dengan kata lain prinsip-prinsip manajemen perusahaan akan diterapkan sebagai ganti prinsip-prinsip produksi sosialis.³⁴

Kemudian baik dalam bidang pertanian maupun bidang industri diadakan perubahan secara radikal.³⁵ Dalam bidang pertanian, sistem pengumpulan produksi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dihapuskan dan diganti dengan sistem kuota. Setiap usaha rumah tangga dapat menjual hasilnya kepada negara dengan jumlah dan harga yang disetujui bersama. Dan mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan dengan sisanya, misalnya dijual ke pasar bebas.

Dalam bidang industri terjadi perubahan radikal dengan diberikannya wewenang kepada para pejabat lokal dan unit produksi yang bebas dalam produksi dan pemasaran. Mereka dapat membeli bahan-bahan mentah di mana

³²Carlyle A. Thayer, "Vietnam's Two Strategic Tasks: Building Socialism and Defending the Fatherland," *Southeast Asian Affairs 1983* (Singapore: ISEAS, 1983), hal. 302.

³³FBIS-APA-79-175 (7 September 1979): K 23.

³⁴Ton That Thien, "Vietnam's New Economy," hal. 700.

³⁵*Ibid.*, hal. 700-701.

mereka menemukannya dan membayar harga pasar untuk itu. Mereka juga dapat menyewa para pekerja secara bebas, membayarnya dengan gaji cukup untuk mendorong produktivitas barang-barang yang lebih baik kualitasnya. Tingkat harga dan bonus dapat ditetapkan sendiri untuk mendorong kapasitas kreativitas mereka secara penuh. Selain itu perusahaan negara dan swasta yang memproduksi untuk ekspor dapat membeli bahan mentah langsung dari luar negeri dan menyimpan devisa mereka. Dalam hal ini tidak diperlukan wewenang alokasi sumber-sumber dari pusat terlebih dulu.

Jika sebelumnya tidak tampak sikap yang jelas dari para pendukung NEP, beberapa bulan kemudian dukungan tersebut jelas terlihat dengan diadakannya kunjungan para pemimpin, seperti Le Duan, Phan Hung, Nguyen Hun Tho, dan Vo Chi Cong ke setiap propinsi di seluruh negara untuk melihat pelaksanaannya. Tetapi ternyata kemajuan yang diharapkan tidak mudah dan tidak bisa segera terwujudkan antara lain karena para penentang NEP telah menghambat dan memperlambat pelaksanaannya. Mereka ini menganggap penggunaan insentif material bagi peningkatan produksi dapat memperkuat individualisme. Mereka khawatir hal ini akan merugikan kepentingan sosialisme.

Demikianlah sampai akhir tahun 1980 perluasan pelaksanaan NEP masih sulit. Ekonomi nasional menunjukkan ketidakseimbangan dalam penyediaan pangan dan mengalami kekurangan lapangan kerja di kota-kota. Ini ditambah lagi dengan bencana alam yang menambah sulit kehidupan rakyat, pertumbuhan ekonomi negatif dan produksi industri turun. Akibat perkembangan ini telah timbul pemberontakan di Nghe Tinh dan Haiphong di Utara, suatu pertanda kesabaran rakyat telah sampai batasnya akibat kesulitan hidup.³⁶

Situasi krisis ekonomi di atas justru makin memperkuat keputusan kelompok pragmatis untuk melaksanakan NEP. Dalam pertanian ditempuh kebijakan peningkatan sistem kontrak baik bagi kelompok petani maupun pribadi. Dalam bidang usaha lain pekerja dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkannya, dan bukan gaji yang ditetapkan. Diberikan otonomi yang luas baik pada pertanian maupun industri. Meskipun demikian pemerintah melakukan pengawasan yang menyeluruh atas seluruh perencanaan. Hal-hal ini dipertegas lagi dalam Rencana Lima Tahun III (1981-1985) yang ditetapkan dalam Sidang Pleno ke-9.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu, seperti penggunaan sistem kontrak bagi petani, pengelolaan lokal, otonomi yang luas, sistem bonus dan upah kerja telah mendorong keberhasilan. Menurut laporan IMF produksi padi-padian mencapai 16,6 juta ton. Hal ini hampir mencapai kebutuhan RSV yang ditargetkan yaitu 17 juta ton. Hasil industri yang telah dikelola oleh manajemen

³⁶Ng Shui Meng, "Vietnam in 1981: The Politics of Preseverance," *Southeast Asian Affairs* 1982 (Singapore: ISEAS, 1982), hal. 380.

lokal yang meliputi 2/3 bagian mengalami peningkatan pada akhir tahun 1982. Sebaliknya hasil industri dari 1/3 bagian yang dikelola pemerintah hanya mengalami peningkatan 4%. Beberapa tindakan pemerintah, misalnya kebijaksanaan pajak, telah berhasil membatasi inflasi yang mencapai 50-60% selama beberapa tahun sebelumnya.³⁷

Tetapi keberhasilan itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Biaya hidup meningkat karena persediaan kebutuhan tidak memenuhi permintaan rakyat. Para kader partai yang menerima gaji tetap, tidak dapat membeli kebutuhannya dan melakukan korupsi. Selain itu kesempatan untuk melakukan korupsi telah meluas dengan meningkatnya otonomi lokal dan perusahaan-perusahaan swasta. Di lain pihak hanya 50% dari perdagangan kecil dan 40% dari perdagangan besar yang berada di bawah pengawasan pemerintah.³⁸

Menanggapi akibat-akibat yang timbul terjadi lagi pertentangan di antara pimpinan partai karena di satu pihak, terutama kelompok ideologis, merasa khawatir bahwa tujuan pembangunan sosialis akan terancam karena makin meluasnya usaha-usaha swasta dengan otonomi yang diperoleh. Mereka menginginkan transformasi di Selatan disempurnakan. Di lain pihak kelompok pragmatis tetap ingin NEP diterapkan karena kemajuan-kemajuan yang dicapai. Pertentangan ini telah menunda diadakannya Kongres Partai ke-5 yang direncanakan pada akhir tahun 1981 dan baru terlaksana pada bulan Maret 1982. Dalam Kongres ini dicapai kompromi yaitu kegiatan swasta untuk sementara tetap dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan transformasi di Selatan harus disempurnakan dalam "hal-hal utama" pada pertengahan dasawarsa 1980-an.

Sebenarnya masih berlanjutnya pertentangan ini karena di satu pihak tidak terlihat realisasi transformasi yang diinginkan, di lain pihak liberalisasi ekonomi mendatangkan kemajuan yang dikhawatirkan akan membuat makin jauh tujuan transformasi tersebut. Hal ini terlihat dari berita-berita resmi selama tahun 1983 yang mempersoalkan kapan pelaksanaan transformasi dimulai. Di lain pihak terlihat kemajuan pesat dalam perkembangan perusahaan ekspor-impor di Selatan yang berada di bawah pimpinan Nguyen Van Linh (Sekjen Komite Partai Kotapraja) dan Mai Chi To (Ketua Komite Rakyat) yang telah mengadakan percobaan dalam manajemen birokrasi dan subsidi. Kemudian timbul persaingan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang menawarkan harga yang terendah dalam penawaran produk ekspor yang sama pada tahun 1981.³⁹

³⁷*International Monetary Fund Report*, "Vietnam Recent Economic Development," 22 Juni 1983, hal. 9; lihat juga Judge, "A Test of Patience," hal. 81.

³⁸Lihat Chanda, "Vietnam in 1983: Keeping Ideology Alived," *Asian Survey*, Vol. XXIV, No. 1 (Januari 1984): hal. 30; *Idem*, "A Liberal Malady," *FEER* (6 Oktober 1983): hal. 48.

³⁹*Idem*, "The New Revolution," *FEER* (10 April 1986): hal. 25.

Demikian pula pada tahun 1982 di Propinsi Long An telah dilakukan percobaan penerapan gaya manajemen baru, yaitu distribusi dihapuskan dan para pekerja selain mendapat gaji total juga bonus (gaji ekstra menurut produktivitas). Dan sebagai ganti ketergantungan suplai bahan mentah pada pemerintah, para manajer mencari bahan mentah mereka sendiri dengan harga pasar dan menentukan harga produksi atas dasar perhitungan biaya. Ternyata percobaan ini berhasil meningkatkan produksi penghasilan para pekerja dan pendapatan pemerintah.⁴⁰

Kasus itu diberitakan telah menimbulkan masalah dengan adanya ancaman penahanan atas para manajer lokal oleh pimpinan Hanoi jika percobaan tersebut tidak dihentikan. Dan ketika mereka mengadukan hal ini kepada Linh, dia bersedia menanggung risiko itu dan percobaan tetap dilaksanakan. Tanggapan itu merupakan petunjuk bahwa pimpinan lokal bersedia menerima risiko pribadi untuk penerapan suatu percobaan kebijakan. Berkaitan dengan perkembangan ini timbul reaksi yang berbeda di kalangan pimpinan partai. Sementara Le Duan, Pham Van Dong dan Le Duc Tho secara hati-hati mendukung percobaan kebijakan di atas, pihak lainnya, seperti Truong Chin, Do Muoi, dan To Huu tetap melanjutkan keberatan-keberatan mereka.⁴¹

Barulah pada akhir tahun 1983, pertentangan partai untuk sementara terpecahkan ketika Le Duan yang hadir dalam pertemuan Komite Partai Kota-praja di Ho Chi Minh City mengemukakan akan diadakannya transformasi di Selatan. Dan untuk menimbulkan kepercayaan terhadap ucapannya itu Nguyen Van Linh dan Mai Chi To digeser dari posnya. Tindakan lebih konkret ialah sejumlah perusahaan ekspor-impor digabungkan menjadi perusahaan tunggal yang diatur dengan ketat oleh negara. Ternyata hasil yang dicapai mengalami kemunduran akibat penggabungan dan intervensi pusat. Pada tahun 1985 hasil ekspor RSV mencapai US\$100 juta, lebih rendah daripada hasil ekspor pada akhir tahun 1982 yang mencapai US\$200 juta.

Begitu pula dengan kolektivisasi pertanian dipercepat. Pada tahun 1984 dilaporkan 30-35% dari seluruh pertanian di Selatan telah diubah menjadi koperasi, suatu peningkatan yang penting dalam kolektivisasi sejak tahun 1981 sebelum diadakannya Kongres Partai ke-5. Tetapi bidang-bidang lain mengalami kelambatan dalam transformasi, karena sektor-sektor swasta masih menguasai bidang pangan, kehutanan, perikanan, dan 1/3 dari seluruh barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh negara dilaporkan telah dijual di pasar bebas. Sementara itu walaupun tingkat kolektivisasi bertambah,

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

sistem kontrak produksi diterapkan meliputi hampir 90% dari seluruh kolektivisasi di seluruh negara.⁴²

Walaupun demikian, perkembangan ini tidak mengakhiri pertentangan di kalangan partai dan liberalisasi ekonomi masih memerlukan berbagai proses pelaksanaan. Dalam bulan Juni 1985 diadakan Sidang Pleno ke-8 Komite Sentral yang menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai harga, gaji dan uang, yaitu penghapusan korupsi dan penghentian subsidi harga dan gaji. Kebijakan ini dinilai merupakan kebutuhan mendesak dan merupakan suatu keputusan yang mengubah ekonomi sosialis. Harga akan ditentukan atas dasar perhitungan biaya bagi seluruh pengeluaran dalam produksi dan penerapan gaji dilaksanakan untuk distribusi kesejahteraan kepada pekerja dan pembayaran yang berdasarkan "kebaikan" harus dihapuskan. Atas dasar keputusan ini rakyat dan kader-kader pemerintah dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan gaji tersebut dan tidak lagi harus terbatas pada barang-barang di toko distribusi. Dengan demikian keputusan ini akan mengenalkan sistem tingkat gaji dan otonomi kepada para manajer untuk menyewa (menggaji) pekerja, serta menetapkan sasaran produksi dan harga.

Tetapi kepuasan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Sidang Pleno di atas disusul dengan kemarahan rakyat ketika keluar keputusan berikutnya mengenai reformasi moneter dalam bulan September 1985, yaitu diubahnya nilai 10 Dong lama dengan 1 Dong baru (1 berbanding 10).⁴³ Kembali timbul krisis ekonomi akibat keputusan ini. Timbul kenaikan harga, kekacauan dalam struktur harga dan upah yang memacetkan, dan makin langkanya barang-barang yang terus berlangsung telah menghancurkan perekonomian Vietnam. Keadaan itu diperburuk lagi oleh makin meningkatnya jumlah penduduk dan pengangguran serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.

Akibat perkembangan ini keluar keputusan perombakan Kabinet oleh Dewan Negara RSV yang diumumkan dalam Komunike tanggal 21 Juni 1986, yaitu setelah Sidang Pleno ke-6 Komite Sentral PKV tanggal 19 Mei-6 Juni 1986. Dalam perombakan ini telah diganti delapan menteri, termasuk Wakil PM To Huu. Mereka ini adalah menteri-menteri yang menangani bidang-bidang komunikasi, transpor, keuangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, bank negara, pertambangan dan batubara, dan kebudayaan. Selain itu Sidang Pleno ke-6 menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, yaitu: desentralisasi yang besar, pembubaran badan-badan milik negara yang jelas tidak mampu lagi memenuhi standar umum dalam memproduksi, pemberian kebebasan kepada para manajer yang dinilai berhasil untuk memecat atau mengangkat

⁴²Duiker, "Vietnam in 1984, between Ideology and Pragmatism," *Asian Survey*, Vol. XXV, No. 1 (Januari 1985): hal. 98-99.

⁴³Chanda, "The New Revolution," hal. 26.

tenaga kerja, dan pemberian otonomi kepada pimpinan bidang-bidang usaha untuk memperoleh pinjaman bagi pengembangan usahanya.

Penggantian menteri-menteri dalam bidang-bidang tertentu mencerminkan kegagalan pelaksanaan kebijakan ekonomi dalam bidang-bidang ini dan diganti dengan orang-orang yang telah berhasil melakukan pembaruan ekonomi dan menjadi barisan depan pembaruan di beberapa propinsi. Penggantian ini diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diputuskan dalam Sidang Pleno ke-6 yang makin menunjukkan liberalisasi ekonomi yang lebih luas.

Dari perkembangan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi selama periode di atas, yaitu sejak penetapan NEP dapat dilihat faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut. Faktor-faktor intern yang sebelumnya ada tampaknya masih berlanjut, ditambah dengan masalah ketidaktrampilan dalam melaksanakan ide dan tugas, pelaksanaan yang tergesa-gesa, pertentangan pendapat di kalangan pimpinan, timbulnya kekeliruan-kekeliruan baru di samping keberhasilan yang dicapai, dan kekurangan biaya.

Faktor terakhir ini merupakan salah satu hambatan utama bagi RSV dalam pembangunan ekonominya. Ditetapkannya kebijakan pembiayaan sendiri dan efisiensi tampaknya sulit dilaksanakan akibat ketidakmampuan negara karena perang dan timbulnya korupsi. Di lain pihak bantuan Soviet dan negara-negara Eropa Timur telah menimbulkan masalah baru bagi Vietnam. Timbul kekesalan negara-negara ini dengan perkembangan ekonomi Vietnam yang tidak membagi imbalan bagi investasi mereka dalam proyek-proyek Vietnam. Hal ini menyebabkan negara-negara ini meningkatkan permintaan atas andil yang lebih besar, seperti penetapan batas waktu bagi proyek produksi patungan. Keadaan ini tidak menguntungkan Vietnam yang masih mengalami isolasi (embargo) ekonomi dari negara-negara Barat, termasuk Jepang.

Perombakan Kabinet dengan tokoh-tokoh pembaru dan dihasilkannya kebijakan-kebijakan baru telah mempengaruhi pergantian pimpinan PKV karena meninggalnya Sekjen PKV, Le Duan. Kongres ke-6 PKV bulan Desember 1986 telah melahirkan pergantian kepemimpinan di negara ini. Kedudukan Sekjen PKV berpindah tangan dari Truong Chin kepada Nguyen Van Linh. PM Pham Van Dong diganti oleh Vo Chi Cong. Nguyen Van Linh dan Vo Chi Cong merupakan tokoh pembaru yang telah berhasil mengadakan pembangunan ekonomi di berbagai propinsi. Diharapkan dengan terpilihnya mereka ini pembaruan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan pertentangan pendapat dapat diperlunak, kalau tidak dapat dihapuskan, karena pelaksanaan NEP membutuhkan tenaga-tenaga yang trampil dan berani mengemukakan gagasan-gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan negara.

IMPLIKASI DAN PROSPEK PEMBARUAN EKONOMI

Dari uraian perkembangan ekonomi Vietnam dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan ekonomi yang kelihatan menyimpang dari prinsip-prinsip sosialis pernah terjadi pada saat pemboman Hanoi oleh Amerika Serikat. Pada waktu itu telah diadakan desentralisasi, pengurangan pengawasan pemerintah, penggunaan sistem kontrak dan otonomi dalam koperasi. Dan kebijakan ini berlaku di Vietnam Utara. Pada periode ini terlihat sikap pragmatis melalui pernyataan-pernyataan mereka yang dianut oleh Le Duan dan Pham Van Dong. Truong Chin sejak awal terkenal dengan sikap-sikapnya yang ortodoks.

Dewasa ini kebijakan seperti itu ditempuh kembali, tidak saja lebih luas dan konkret tetapi juga mencakup Vietnam Selatan. Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) antara lain meliputi penghapusan manajemen birokrasi pusat, penghentian subsidi atas harga dan gaji, sistem kuota, otonomi lebih luas di tingkat lokal, penerapan insentif material dan kekuatan pasar. Begitu pula sikap pragmatis makin menonjol dengan adanya kelompok pimpinan Selatan.

Timbulnya pembaruan politik setelah pembaruan ekonomi adalah mungkin mengingat peluang yang ada. Bukan tidak mungkin tuntutan-tuntutan dalam pembaruan ekonomi akan meningkat menjadi tuntutan yang lebih luas dalam bidang politik, terlebih lagi dengan adanya kelompok pragmatis kaum muda yang menjadi pimpinan partai. Mereka ini akan lebih berani menempuh kebijakan baru tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik.

Salah satu contoh adalah sikap Nguyen Van Linh sebagai pimpinan lokal yang berani mengambil risiko penahanan, karena percobaan gaya manajemen baru yang berhasil diterapkan oleh para manajernya. Oleh karena itu adanya wewenang lokal dan otonomi yang diberikan kepada pimpinan lokal akan memberikan peluang bagi tuntutan yang lebih luas yang meliputi bidang politik, terutama apabila pelaksanaan NEP mengalami kemajuan yang menonjol.

Kemungkinan itu terlihat jelas setelah diadakannya Kongres Partai ke-6 yaitu ketika diadakan pemilihan anggota Majelis Umum baru pada tanggal 20 April 1987 yang lebih terbuka dan bebas daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya kampanye para calon dan pertemuan dihadiri oleh umum dan para pemilih dapat mengemukakan kritik-kritik dan keluhan-keluhan mengenai berbagai persoalan. Ketua PKV yang baru telah mendengarkan keluhan-keluhan mereka pada pertemuan bulan Maret 1987 mengenai kurangnya barang-barang konsumsi, masalah perumahan, kurangnya sekolah dan

meningkatnya pengangguran di kalangan kaum muda.⁴⁴ Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun hal ini belum diterapkan di seluruh negara, peristiwa itu merupakan petunjuk jelas adanya usaha-usaha pembaruan politik.

Walaupun demikian perkembangan ini masih perlu diamati kemungkinannya, karena terjadinya pembaruan baik dalam bidang ekonomi maupun politik belum tentu mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan partai lainnya. Selain itu kebutuhan tenaga-tenaga yang trampil dan pemikiran yang tajam dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi baru dapat mengalami hambatan karena banyaknya para kader partai yang masih dipakai karena pertimbangan kesetiaan mereka pada Zaman Revolusi. Mereka ini masih menganut sikap yang lebih kaku, termasuk dalam bidang politik.

Di samping faktor-faktor intern partai ini, faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan pembaruan ekonomi Vietnam dan pengaruhnya atas pembaruan politik adalah situasi internasional. Dalam hal ini hambatan utama Vietnam adalah peranannya dalam Konflik Kamboja. Bagaimanapun pembaruan ekonomi akan membutuhkan hubungan yang lebih luas terutama bantuan asing dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Selama ini masalah Kamboja telah menjadi perintang bagi ditingkatkannya hubungan dan kerjasama demikian, terutama bantuan Barat, termasuk Jepang. Negara-negara ini mendukung strategi ASEAN untuk mengisolasi Vietnam sampai negara ini menarik pasukannya dari Kamboja. Oleh karena itu ketika terjadi pendekatan swasta Jepang untuk mengadakan penanaman modal di Vietnam, negara-negara ASEAN mengajukan protes kepada Jepang, karena dapat melemahkan strateginya terhadap Vietnam.

Di lain pihak walaupun Uni Soviet telah berjanji untuk meningkatkan bantuan ekonominya kepada Vietnam yang dikemukakan oleh Ligachev dalam Kongres PKV ke-6, negara ini juga mengeluh bahwa Vietnam tidak memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan efektif. Selain itu bantuan Soviet yang makin besar akan mengakibatkan ketergantungan yang makin besar Vietnam pada negara ini.

Dengan demikian masa depan pembaruan ekonomi Vietnam akan ditentukan oleh berbagai faktor intern dan ekstern. Antara lain seberapa jauh Vietnam dapat memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Begitu pula iklim yang baik dan turunnya pertambahan penduduk akan sangat mendukung pembaruan ekonomi Vietnam. Selain itu pelaksanaan pembaruan ekonomi Vietnam akan tergantung pada keberhasilan mengatasi perbedaan pendapat yang timbul antara kelompok "pragmatis" dan "ideologis."

⁴⁴Murray Hiebert, "Elections with Difference," *FEER* (7 Mei 1987): hal. 35.

Pembaruan ekonomi dan politik yang berhasil mungkin akan dapat memberi sumbangan positif kepada stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara, kalau keberhasilan pembaruan itu akan menampilkan Vietnam yang moderat dan pragmatis. Tetapi kegagalan dalam hal ini dapat mengembalikan Vietnam sebagai negara sosialis yang bergaris keras, dan bukan tidak mungkin ekspansif, serta makin tergantung kepada Uni Soviet.

The Indonesian Quarterly



The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**
J. PANGLAYKIM.
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**
Julian M. BOILEAU
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**
Hadi SOEASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)



Centre for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160.
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS IA.